# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah.

Negara adalah suatu organisasi yang didalamnya terdapat rakyat,wilayah yang permanen,dan pemeritahan yang sah,dalam arti luas Negara merupakan social ( masyarakat ) yang diatur secara konstitusional (berdsarkan undang-undang ) untuk mewujudkan kepentingan bersama.

Fungsi atau tugas Negara adalah untuk mengatur kehidupaan yang ada dalam Negara untuk mencapai tujuan Negara fungsi negaraantara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan.

Tujuan Negara Indonesia telah tercantum dalam pembukaan undang-undangdasar 1945 alinea ke-4 yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, kemerdekaan,perdamaian abadi dan keadilan social

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan untuk mempermudahnya wilayah republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah.

Perjalanan otonomi daerah di Indonesia merupakan isu menarik untuk diamati dan dikaji, karena semenjak pendiri Negara menyusun format Negara, isu menyangkut pemerintahan local telah diakomodasikan dala pasal 18 undang-undang dasar tahun 1945 beserta penjelasanya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pemerintahan daerah dalam pengaturan pasal 18 undang-undang dasar tahun 1945 telah mengakui adanya keragaman hak dan asal usul yang yang merupakan bagian dari sejarah panjang Indonesia

Sebagai mana yang dimaksut dalam undang-undang dasar 1945 pasal 18 ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republic Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diiatur dengan undang-undang.

Meskipun Negara Republik Indonesia menganut prinsip Negara kesatuan dengan pusat kekuasaan berada pada pemerintahan pusat namun karna heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi social, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat, maka desentralisasi arau distribusi kekuasan/kewenangan dari pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah berotonom.

Fungsi pemerintahan daerah sebagai perangkat daerah bertugas menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalanya pemerintahan. Dalam penyelenggaraa urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu Negara, yakni sebagai berikut:

a. Asas desantralisasi. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
b. Asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemeritahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan kepada instansi vertical wilayah tertentu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan adalah dari pemerintahan kepada daerah dan atau desa; dari pemerintah provinsi kepada pemerintahan kabupaten/kota da atau desa ; serta dari pemerintahan kabupaten/kota kepada desa untuk yugas tertentu.

Pengaturan mengenai pemerintahan daerah telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan kabupaten kota sebagai pemerintahan daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam melaksanakan otonomi daerah itu sendiri.

Untuk urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.Salah satu urusan pemerintahan pilihan di daerah Kabupaten Kampar adalah BPPKP Kabupaten Kampar,badan ini harus mengikuti proses pemetaan bidang yang akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementrian atau lembaga nonkementrian bersama pemerintah daerah. Proses selanjutnya setelah dipilih bidang yang akan diprioritaskan, bidang itu ditetapkan melalui peraturan mentri.

Dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh daerah dan urusan apa yang tidak dapat dikerjakan oleh daerah, ada dua jenis urusan didalam undang-undang ini yang dapat dikerjakan oleh daerah.

Pada pasal 11 undang-undang nomor 23 tahun 2014 ayat 1 menjelaskan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksut dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenagan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan denagan pelayanan dasar sebagaimana yang dimaksut dalam pasal 11 ayat (2) yakni meliputi :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
d. Perumaan rakyat dan kawasan pemukiman
e. Ketentraman , ketertiban umum , dan perlindungan masyarakat; dan
f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana yang di maksut dalam pasal 11 ayat (2) yakni meliputi :

a. Tenaga kerja
b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
c. Panagan
d. Pertahanan
e. Lingkungan hidup
f. Administrasi kependudukan dan catatan sipil
g. Permberdayaan masyarakat dan desa
h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
i. Perhubungan
j. Komunikasi dan informatika
k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
l. Penanaman modal
m. Kepemudaan dan olahraga
n. Statistic
o. Persandian
p. Kebudayaan
q. Perpustakaan; dan
r. Kearsipan

Dan pada pasla 12 ayat 3 menjelaskan urusan pemerintahan pilihan sebagaimana dimaksut dalam pasal 11 ayat (1) meliputi :

a. Kelautan
b. pariwisata
c. Pertanian
d. Kehutanan
e. Energy dan sumber daya mineral
f. Perdagangan
g. Peindustrian; dan
h. Transmigrasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Salah satu urusan pemerintahan pilihan didaerah kabupaten Kampar adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan , badan ini harus mengikuti proses pemetaan bidang yang akan diprioritaskan, ini dilakukan oleh kementrian atau lembaga nonkementrian bersama pemerintahan daerah. Proses selanjutnya setelah dipilih bidang yang akan diprioritaskan, bidang itu ditetapkan melalui peraturan mentri.

Dalam peraturan mentri nomor 131 tahun 2014 kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam factor sumberdaya alam, social budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luas minimal sekala efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolan meliputi kawasan pertaian nasional, kawasan pertanian provinsi, kawasan pertanian kabupaten/kota

Perkembangan kabupaten Kampar setiap tahunnya mengalami pertambahan pertumbuhan penduduk khususnya penduduk perdesaan, perkembangan dan pertumbuhan penduduk di perdesaan yang semakin pesat dan penduduk perdesaan memilih pekerjaan sebagai petani. Kehadiran kabupaten Kampar sebagai kabupaten berskala besar dengan luas 27.908,32 Km² yang hampir sama luasnya dengan kabupaten besar lainya.

Dengan berpendudukan 688.204 jiwa kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan oleh penduduknya terutama dibidang pertanian dan perikanan. Sebagian besar penduduk kabupaten Kampar 67.22% bekerja disektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan hanya sebagian kecil 0.22% yang bekerja disektor listrik, gas, dam air.

Dengan luas 241.5 ribu hektare lahan pertanian dan perkebunan pemerintah Kabupaten Kampar membuat Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan ( BBPKP ) yaitu sebuah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

lembaga pendukung tugas bupati dalam bidang penyuluhan pertanian dan meningkatkan taraf ketahanan pangan di perdesaan

Selanjutnya pada Peraturan Kampar Bagian 3 Nomor 6 Tahun 2012 Mengenai Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan ( BPPKP ) mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kabupaten dalam bidang penyuluhan pertanian dan ketahanan pangan.

Salah satu tugas badan pelaksan penyuluhan dan ketahanan pangan membahas tentang tata kerja dan pembiayaan maka dalam hal ini tentunya mencangkup aspek kerja badan pelaksanaan penyuluhan dan ketahanan pangan ( BPPKP ) dalam meningkatkan hasil pertanian dalam melakukan tugas-tugasnya. Dengan menggunakan pembiayaan dan tata kerja yang maksimal sehingga pemantauan , peningkatan , evaluasi, pengawasan ,pemeliharaan, pembinaan, dan pengelolaan dilakukan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan oleh semua kalangan masyarakat kabupaten Kampar terhadap badan itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai Fungsi:

a. Menyusun Kebijakan tekhnis dibidang Penyuluhan Peftanian, Perikanan dan Kehutanan dan Ketahanan Pangan; : [.
b. Menyusun Rencana program penyuluhan di sektor Pertanian,perikanan dan kehutanan, dan Ketahanan Pangan;
c. Melaksanakan , mengembangkan Mekanisme, Tata Kerja dan Metode Penyuluhan;
d. Melaksanakan penyimpulan, pengelolaan, Pengawasan dan Penyebaran Materi Penyuluhan bagi Pelaku utama dan Pelaku Usaha;
e. Melaksanakan Pembinaan, Pengembangan Kerja Sama, Kemitraan, Pengelolaan Kelembagaan, Ketenagaan, sarana dan Prasarana, serta pembiayaan Penyuluhan;
f. Menumbuh kembangkan dan memfasilitasi kelembagaan Forum Kegiatan Pelaku Utama dan Pelaku usaha;.
g. Melaksanakan peningkatan Kapasitas penyuluhan PNS, Swadaya dan Swasta melalui Proses Pembelajaran secara berkelanjutan;.
h. Melakukan koordinasi dalam rangka mempertahankan ketersedian dan cadangan pangan' kelancaran arus distribusi pangan, dan kualitas mutu pangan;

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

i. Melakukan pembinaan dan pengembangan dalam rangka Penyediaan dukungan dan bantuan penganekaragaman pangan lokal; .
j. pemantauan dan Evaluasi terhadap ketersediaan pangan, cadangan pangan daerah dan Arus distribusi, serta Analisa harga keadaan gizi masyarakat; dan Pemerataan;.
k. pemantauan dan Evaluasi masalah Kekuragan Pangan dan gizi dan peningkatan Mutu pangan dan gizi; pola konsumsi pangan rakyat, pengembangan pangan Lokal;
l. penyediaan dukungan dan bantuan dalam rangka sosialisasi penganekaragaman pangan;
m. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi penatausahaan, kepegawaian' keuangan, perencanaan Program dan Anggaran Keuangan dan Perlengkapan serta Organisasi;
n. Melaksanakan Tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya;
o. melakukan pengelolaan unit pelaksanaan teknis (upt)

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) memiliki program-program dalam melakukan tugasnya yaitu : (sumber program BPPKP tahun 2016):

a. Program Pembangunan Pertanian
   Program ini bertujuan untuk menigkatkan pemahaman petani tentang pembangunan pertanian
b. Program Kepemimpinan, Dinamika Kelompok
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja apparat petani
c. Program Budidaya Tanaman
   Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petani tentang teknologi pertanian
d. Program Pertanian Terpadu
   Program dibuat supaya petani atapun kelompok tani mampu menciptakan hal-hal yang baru dengan mengelola sumberdaya yang ada.
e. Program kewaspadaan pangan dan keanekargaman pangan
   Program ini dilakukan dengan kegiatan pelatihn yang bermanfaat untuk petani, program ini disusun disebut karena kosumsi masyrakatnya belum bergizi

Dalam meningkatkan hasil pertanian yang bagus maka pemerintah harus berperan besar untuk menciptakan petani-petani unggul disetiap daerah dengan cara memberdayakan para petani-petani perdesaan yang bertujuan untuk :

a. Mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
b. Menyediakan prasarana dan sarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani;
c. Memberikan kepastian usaha tani;
d. Melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi , biaya tinggi dan gagal panen
e. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju , modern dan berkelanjutan; dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

f. Menumbuh kembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani;

Perkembangan pembangunan Kabupaten Kampar setiap tahunya mengalami peningkatan serta berdampak bagi kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar terkususnya di Kecamatan Tapung Hilir dengan luas 1.013,56 $km^2$ dengan berpenduduk 52.122 jiwa. Dengan mata pencarian masyaraktnya berupa petani tradisioanl.

Keberhasilan penyuluhan pertanian bukan hanya di tentukan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahnan Pangan melainkan juga bekerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian ditingkat kecamatan. Dalam hal ini Balai Penyuluhan Pertanian yaitu tugasnya membantu Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan dalam memberikan materi penyuluhan sesuai dengan program-program yang dibuat Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Kabupateb Kampar.

Adapun metode-metode yang digunakan Balai Penyuluhan Pertanian dalam memberikan penyuluhan pertanian di kecamatan tapung hilir yaitu l :

1. Metode Langsung
   Metode langsung yaitu tim penyuluh diberikesempatan untuk berhadapan langsung dengan para petani
2. Metode Yang Tidak Langsung
   Dalam hal ini penyuluh tidak langsung berhadapan secara tatap muka dengan petani, tetapi dalam menyampaikan pesannya melalui perantara (media)

3. Metode Dengan Pendekatan Masal
   metode ini penyuluh menyampaikan pesannya secara langsung maupun tidak langsung kepada sasaran dengan jumlah yang banyak (massal)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut ini adalah data jumlah desa yang ada di kecamatan tapung hillir

**Table I.1 Jumlah Desa Yang Ada Dikecamatan Tapung Hillir**

| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Beringin lestari | 2.317 Jiwa |
| 2 | Cinta damai | 2.074 Jiwa |
| 3 | Gerbang Sari | 2.065 Jiwa |
| 4 | Kijang Jaya | 3.796 Jiwa |
| 5 | Kijang Makmur | 4.046 Jiwa |
| 6 | Kota Baru | 3.337 Jiwa |
| 7 | Kota Garo | 9.414 Jiwa |
| 8 | Kota Aman | 1.734 Jiwa |
| 9 | Kota Bangun | 4.071 Jiwa |
| 10 | Sikijang | 9.481 Jiwa |
| 11 | Sukamaju | 1.618 Jiwa |
| 12 | Tanah Tinggi | 2.136 Jiwa |
| 13 | Tandan Sari | 1.150 Jiwa |

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| | | |
|---|---|---|
| 14 | Tapung Lestari | 1.431 Jiwa |
| 15 | Tapung Makmur | 1.819 Jiwa |
| 16 | Tebing Lestari | 1.633 Jiwa |
| Jumblah Populasi | | 52.122 Jiwa |

Sumber : Kantor Camat Tapung Hillir

Dari table ditas dapat di lihat dari tahun 2014-2016 semua jenis tanaman buah-buahan pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 20%-30% dari tahun 2014 akan tetapipada tahun 2016 jenis tanaman buah-buahan mengalami penuruna mencapai 10%-20%. Itu bisa kita lihat dari beberpa tanaman buah buahan yang tingkat produksinya menurun jengkol, petai, salak, pisang, nangka dan durian.

**Table 1.2 Hasil Produksi Tanaman Buah Buhan Pada Tahun 2014-2016 Dikecamatan Tapung Hillir Kabupaten Kampar**

| No | Jenis tanaman buah-buahan | Tahun (ton) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Alpukat | 10.00 | 13.30 | 0 |
| 2. | Belimbing | 0 | 7.50 | 0 |
| 3. | Duku/langsat | 25.13 | 0 | 37.50 |
| 4. | Durian | 55.00 | 143.00 | 154.00 |
| 5. | Jambu Biji | 0 | 11.20 | 12.00 |
| 6. | Jambu Air | 1.40 | 3.57 | 10.50 |
| 7. | Jeruk Siam | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Jeruk besar | 0 | 0 | 0 |

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Manga | 17.04 | 34.50 | 30.00 |
| 10. | Manggis | 30.00 | 49.24 | 40.00 |
| 11. | Nangka | 70.89 | 70.89 | 34.00 |
| 12. | Nanas | 0.36 | 2.40 | 5.74 |
| 13. | Papaya | 31.50 | 38.30 | 28.00 |
| 14. | Pisang | 30.00 | 365.40 | 30.00 |
| 15. | Rambutan | 10.00 | 16.00 | 65.00 |
| 16. | Salak | 600.00 | 720.00 | 120.00 |
| 17. | Sawo | 8.75 | 17.61 | 0 |
| 18. | Sirsak | 0 | 0.86 | 0.45 |
| 19. | Sukun | 4.95 | 9.00 | 0 |
| 20. | Melinjo | 1.50 | 3.11 | 1.50 |
| 21. | Buah Naga | 0 | 0 | 0 |
| 22. | Petai | 14.70 | 14.91 | 4.50 |
| 23. | Jengkol | 8.50 | 20.00 | 5.00 |

**Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan**

Dari table ditas dapat di lihat dari tahun 2014-2016 semua jenis tanaman buah-buahan pada tahun 2015 mengalami peningkatan mencapai 20%-30% dari tahun 2014 akan tetapipada tahun 2016 jenis tanaman buah-buahan mengalami penuruna mencapai 10%-20%. Itu bisa kita lihat dari beberpa tanaman buah buahan yang tingkat produksinya menurun jengkol, petai, salak, pisang, nangka dan durian.

**Table 1.3 Hasil Produksi Tanaman Sayur-Sayuran dan Holtiultura Pada Tahun 2014-2016 Dikecamatan Tapung Hillir Kabupaten Kampar**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| No | Jenis Sayuran | Tahun (ton) | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Kacang panjang | 87.00 | 97.80 | 69.72 |
| 2. | Cabe besar | 90.39 | 128.18 | 118.00 |
| 3. | Cabe rawit | 34.00 | 74.25 | 55.00 |
| 4. | Ketimun | 298.00 | 241.76 | 229.05 |
| 5. | Terung | 161.50 | 174.76 | 123.36 |
| 6. | Kangkung | 223.75 | 177.48 | 157.76 |
| 7. | Bayam | 234.00 | 204.75 | 156.00 |
| 8. | Labu siam | 0 | - | - |
| 9. | Sawi | 0 | - | - |
| 10. | Jamur | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Gambas | 52.80 | 81.92 | 10.24 |
| 12. | Pare | 39.60 | 59.40 | 4.95 |
| 13. | Bawang merah | 0 | 0 | 49.00 |
| 14. | Semangka | 255.00 | 214.50 | 33.00 |
| 15. | Melon | 0 | 0 | 0 |

**Sumber : Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan**

Dari table diatas dapat dilihat dari tahun 2014-2016 pada tahun 2015 semua jenis tanaman sayur-sayuran dan holtikultura mengalami peningkatan yang sangat besar mencapai 30%-50% dari tahun sebelumya yaitu tahun 2014. Akan tetapi pada tahun 2016 semua jenis tanaman sayur-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sayuran dan holtikultura mengalami penurunan yang sangat besar yaitu mencapai 25%-45%. Itu bisa kita lihat dari beberpa tanaman sayur-sayuran dan holtikultura yang tingkat produksinya menurun yaitu semangka, pare, bayam, terung dan cabe besar.

Dari banyaknya penurunan jenis pertanian dikecamatan tapung hillir kabupaten Kampar priode 2014-2016 penulis tertarik untuk mengevaluasi Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahnan Pangan yang mempunyai tugas salah satunya memberikan penyuluhan di sector pertanian.

Banyaknya sector pertanian yang ada dikecamatan tapung hillir kabupaten Kampar, masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah dalam mengelola atau memberi sarana dan prasarana dalam meningkatkan hasil produktivitas pertanian di kecamtan tapung hillir.

Selanjutnya dapat dilihat jumlah tim penyuluh yang ada dikecamatan-kecamatan kabupaten Kampar.

**Table 1.4 Jumlah Penyuluh Yang Ada Dikecamatan-Kecamatan Kabupaten Kampar**

| No | Kecamatan /BPP | Jumlah Penyuluh | Jumlah Desa |
|---|---|---|---|
| 1. | Bangkinang kota | 5 | 4 |
| 2. | Kuok | 8 | 9 |
| 3. | Bangkinang | 8 | 9 |
| 4. | Salo | 7 | 6 |
| 5. | Kampar | 15 | 18 |
| 6. | Kampar utara | 7 | 8 |
| 7. | Kampar timur | 6 | 9 |
| 8. | Rimbo jaya | 8 | 7 |
| 9. | Tambang | 11 | 17 |

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10. | Tapung | 7 | 25 |
| 11. | Tapung hulu | 4 | 14 |
| 12. | Tpung hilir | 5 | 16 |
| 13. | Siak hulu | 8 | 12 |
| 14. | Perhenian raja | 7 | 5 |
| 15. | Gunung sahilan | 5 | 9 |
| 16. | Kampar kiri | 6 | 20 |
| 17. | Kampar kiri tengah | 10 | 11 |
| 18. | Kampar kiri hulu | 9 | 24 |
| 19. | Kampar kiri hilir | 6 | 8 |
| 20. | XIII koto Kampar | 7 | 13 |
| 21. | Koto Kampar Hulu | 3 | 6 |
| | Jumlah | 152 | 250 |

**Sumber : Balai penyuluhan Pertanian**

Dari table diatas dapat dilihat jumlah penyuluh yang disediakan badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan untuk seluru kecamatan yang ada dikabupaten Kampar hanya 152 orang sedangkan Kampar mempunyai 21 kecamatan dengan jumlah desa 250 desa, ini kita lihat belum tercukupnya penyuluh yang ada di kabupaten kampar. Sedangkan untuk di kecamatan tapung hilir penyuluh yang ada di kecamatan tapung hilir hanya ada 5 orang saja sedangkan jumlah desa di kecamatan tapung hilir sebanyak 16 desa dan ini lah yang mengakibtkan kurang meratanya penyuluhan dibidang pertanian yang diterima oleh masyarakat kecamatan tapung hilir kabupaten Kampar dan mengakibatkan tingkat produksi pertanian yang dikelola petani semakin menurun.

Dengan adanya badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan (BPPKP) sangat diperlukan bagi para petani di desa-desa yang ada dikecamatan tapung hillir untuk memberikan penyuluhan mengenai pertanian sehingga hasil pertanian warga dapat meningkat dan bisa terhindar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dari kegagalan panen yang biasanya disebebkan oleh hama-hama dan kemampuan petani yang kurang paham dalam menanam suatu tanaman sehingga menyebabkan kegagalan panen.

Pada hal ini tugas Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan (BPPKP) kabupaten Kampar yang meliputi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas atau hasil pertanian yang lebih baik, tapi pada pelaksanaannya hal ini masih terdapat hasil yang kurang memuaskan yang dirasakan masyarakat, karena terdapat berbagai fenomena-fenomena yang penulis temukan, antara lain:

a) Masih kurangnya penyebaran materi program penyuluhan pertanian oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan. Ini dapat kita lihat dari penurunan tingkat produksi pertanian baik dari sector buah-buahan dan sector sayur-sayuran dan holtikultura.
b) Masih kurangnya kurangnya SDM di bagian tim penyuluh yang di berikan oleh badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pagan kabupaten Kampar untuk memberi penyuluhan di kecamatan tapung hilir.ini dapat kita lihat dari table 1.4 jumlah tim penyuluh di kecamatan tapung hilir sebanyak 5 orang.

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan data yang diperoleh badan pelaksana penyuluh dan ketahan pangan kabupaten Kampar masi terjadinya beberapa sector yang belum bisa dijangkau badan pelaksan penyuluhan dan ketahan pangan (BPPKP) dalam mensosialisasikan dibidang pertanian.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka untuk mempermudah pembahasan penulis merumuskan permasalahan **"Bagaimanakah Pelaksanaan Fungsi Badan Pelaksan Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Dikecamatan Tapung Hillir Kabupaten Kampar?**

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## C. Tujuan dan kegunaan penelitian

### 1.Tujuan penelitian

tujuan penelitian ini ialah:

a. Untuk mengetahui fungsi pelaksanaan badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan dikecamatan tapung hillir.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksana badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan dalam menjalankan tugasnya.

### 2.Kegunaan dan Manfaat Penlitian

Penelitian ini diharapan dapat memberikan manfaat ,yaitu manfaat teoritis,praktis maupun kontributif.

a. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pemerintahan di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau sebagai sumber referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan menambah sumber pustaka yang telah ada.

b. Manfaat Praktis

   1) Bagi badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan kabupaten Kampar dapat dijadikan referensi akan pentingnya penyuluhan pertanian yang diterima oleh masyarakat.
   2) Bagi para akademis penelitian ini sebagai pengetahuan dan informasi guna menciptakan kemampuan pemahaman mengenai badan pelaksana penyuluhan dan ketahanan pangan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Manfaat Akademik

Dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi subangan pemikiran bagi peneliti lainya dimasa yang akan datang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :